

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem kepartaian di Indonesia pada Era Reformasi ini tergolong pada sistem pluralitas ekstrem, dimana jumlah partainya sangatlah banyak dan memiliki rentang ideologi formal yang tajam serta cenderung bergerak secara sentrifugal yang berpotensi melahirkan perpecahan menjadi partai-partai baru.¹ Dengan perpecahan yang menimbulkan partai-partai baru ini, Indonesia menjadi negara yang menganut sistem partai politik Multipartai di dalam pemerintahan Presidensial. Untuk situasi politik multipartai itu sendiri, koalisi politik merupakan keharusan bagi partai politik manapun karena: 1) Tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain, 2) Koalisi politik menekankan adanya satu persamaan tujuan atau persepsi, juga kedekatan ideologis, 3) Pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi sehingga koalisi partai politik tidak bisa dihindarkan.² Melihat keharusan yang timbul di atas sistem Multipartai di dalam pemerintahan Presidensial juga dapat menimbulkan “*breakdown of democratic regime*” atau dapat menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif dan stabil. Hal ini mengisyaratkan bagaimana sistem multipartai

¹ Hanta Yuda, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati: Dilema ke Kompromi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 34.

² Deliar Noer, 1999, *et.al, Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Partai Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta, ALVABET, hlm. 303.

tidak sesuai dengan sistem pemerintahan Presidensial. Ketidaksesuaian ini dikuatkan dengan alasan: (1) pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah yang dimana dapat menimbulkan kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di Parlemen; (2) koalisi yang terbentuk dalam sistem Presidensial cenderung bersifat rapuh dan mudah retak karena ketidakdisiplinan partai politik koalisi. Di satu sisi partai-partai politik haruslah loyal kepada presiden. Namun disisi lain, seringkali partai anggota koalisi bermanuver di parlemen karena partai politik anggota tersebut dihadapkan pada kepentingan membangun popularitas untuk memenangkan kompetisi berikutnya (elektoralis) maupun terikat keharusan mempresentasikan aspirasi konstituen pendukungnya. Ketidakdisiplinan partai-partai politik yang ada dalam koalisi, membuat setiap saat dukungan partai di parlemen menjadi melemah dan selanjutnya bisa hadir "*minority government*". Hal ini mengakibatkan Presiden yang merupakan *single chief of executive* di dalam sistem Presidensial tidak dapat bekerja secara efektif dikarenakan terganggu dengan konfigurasi politik di parlemen yang sangat fluktuatif. Seringnya manuver yang dilakukan oleh partai-partai politik di parlemen mengakibatkan instabilitas pemerintahan yang bisa saja berujung pada kejatuhan seseorang Presiden; (3) untuk membangun loyalitas koalisi pendukungnya, Presiden cenderung bersikap lunak-akomodatif dengan memberikan insentif kepada partai-partai koalisi pendukungnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana

Presiden tidak leluasa mengambil keputusan sendiri dikarenakan lebih banyak “tersandera” oleh kepentingan koalisi partai yang mendukungnya. Partai-partai mitra koalisi itu sendiri juga akan menggunakan wewenangannya di parlemen sebagai alat untuk bernegosiasi dengan Presiden. Hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat bisa menjadi alat untuk bernegosiasi dengan Presiden terutama dalam momentum politik seperti pembentukan kabinet, reshuffle kabinet ataupun pengambilan kebijakan yang dilakukan Pemerintah.

Adapun problem lain yang menyebabkan kerapuhan demokrasi di Negara yang menganut sistem Presidensial, yaitu dikarenakan seperti konteks perkembangan ekonomi, ukuran dari suatu negara, lokasi geografis, dan sebagainya. Tidak hanya konteks itu saja melainkan juga mengenai perilaku partai politik di Indonesia, kita dapat melihat perilaku partai dengan menggunakan tiga dimensi yang disampaikan Steven B. Wolinetz: pencari-suara (*vote-seeking*), pencari-jabatan (*office-seeking*), dan pencari-kebijakan (*policy-seeking*). Dari ketiga yang disampaikan, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perilaku partai politik pasca Orde Baru hampir sama, yakni: lebih didorong oleh *vote seeking* dan *office seeking* dibandingkan dengan *policy seeking*. Dalam hal ini, partai politik hanya hadir pada saat momentum pemilihan baik dalam pemilu lokal maupun nasional. Dan di dalam banyak hal, perilaku partai juga dipengaruhi oleh logika pemilihan (elektoralis) terlihat lebih berorientasi pada *catch all party* dibandingkan ideologis-kebijakan.

Sedangkan *office seeking* lebih memberikan perilaku partai untuk mengejar posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Hal ini berkonsekuensi partai-partai tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain dari sisi orientasi kebijakan. Melihat hal tersebut diperlukan suatu upaya dalam memperbaiki sistem Presidensial-Multipartai agar menjadikan pemerintahan yang efektif dan stabil.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan melakukan penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan koalisi partai politik dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian menurut penulis adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perbandingan koalisi partai politik pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh penulis sebagai pemikiran di dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Pembangunan

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan kajian di dalam perkembangan pembangunan sistem hukum politik di Indonesia agar kedepannya dapat terwujud suatu pemerintahan yang stabil dan efektif dalam Sistem Presidensial-Multipartai yang dianut Indonesia.